



Angin Segar Pariwisata Yogya

Presiden Buka Blokir Anggaran Rp 86 T

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Ada angin segar untuk ekonomi di Yogyakarta. Khususnya, dari pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi di Yogyakarta.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran Rp 86 triliun untuk kementerian dan lembaga (K/L).

Langkah itu bakal membuat agenda *meeting, incentive, convention, and exhibition* (MICE) bergairah di Yogyakarta. "Kalau memang blokir anggaran itu dibuka dan kementerian-kementerian kembali menggunakan fasilitas-fasilitas kami sehingga kami bisa terangkat dan karyawan kami yang 'unpaid leave' (dirumahkan tanpa digaji) bisa kami panggil lagi," ujar Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono, Senin (5/5/2025).

Deddy menjelaskan, dari catatan PHRI DIY, ada sekitar 5.800-an karyawan hotel/restoran di DIY masih berstatus dirumahkan sementara tanpa digaji. Mereka dirumahkan sejak awal tahun lalu karena tak adanya pemasukan hotel dari MICE.



DOK. PHRIJOGLO JOGJA
Deddy Pranowo Eryono
Ketua PHRI DIY

"MICE ini separo lebih sumber pemasukan kami. Apalagi, saat ini kunjungan siswa dari Jawa Barat dan Jakarta sudah dilarang. Otomatis itu juga berdampak kepada angka keterisian kamar," jelasnya.

Ia menegaskan, kunjungan dari event MICE tak hanya menguntungkan hotel dan restoran saja. Pelaku wisata lain seperti penjual cinderamata, rental transportasi, dan yang lain juga diuntungkan.

Perputaran ekonomi dari MICE di Yogyakarta sangat besar. "Sangat besar dampaknya. Ini yang sebenarnya kami harapkan. Karena MICE ini tidak hanya *dijagake* hotel dan restoran saja. Pelaku wisata lain juga mendapatkan perputaran ekonomi dari MICE ini," katanya.

Dia berharap, usai pembukaan blokir itu, rencana MICE dari kementerian dan lembaga bisa segera terealisasi.

asikan. Ini agar pelaku wisata di Yogyakarta bisa kembali mendapatkan pemasukan.

"Memang ada wisata yang memang masih berdenyut di Yogyakarta. Tapi, sifatnya personal, rebutannya banyak," klaimnya.

Seperti telah diketahui, pemerintah telah membuka anggaran yang dicadangkan atau blokir anggaran dari 99 kementerian/lembaga senilai Rp 86,6 triliun. Itu seiring dengan selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers, APBN K/L Edisi April 2025 dikutip di Jakarta, Jumat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Inpres telah diselesaikan. Laporan itu dilakukan pada 7 Maret 2025.

Selanjutnya, Menkeu meminta izin kepada Presiden untuk memfokuskan kembali, merelokasi, membuka blokir anggaran, dan berbagai langkah lainnya agar belanja K/L bisa lebih tajam sesuai dengan prioritas pemerintah.

"Kalau besarnya adalah Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi," ujar Suahasil. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005